

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KERANGKA PENDANAAN

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menetapkan dan mengatur pembagian kewenangan dan pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan azas kepatutan dan rasa keadilan. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Pemandagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barru dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban sampai pada pemeriksaan atas APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Struktur APBD Kabupaten Barru yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah merupakan instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah.

3.1. KINERJA KEUANGAN TAHUN 2011-2015

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasan antara kebijakan (*policy*), perencanaan (*planning*) dengan penganggaran (*budgeting*) antara pemerintah dengan pemerintah daerah.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Untuk itulah sehingga analisis pengelolaan keuangan daerah menjelaskan tentang aspek kebijakan keuangan daerah yang

berkaitan dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah guna mewujudkan visi dan misi.

Struktur APBD Kabupaten Barru terdiri atas: (1) Penerimaan Daerah yang di dalamnya terdapat Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah; (2) Pengeluaran Daerah yang di dalamnya terdapat Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

3.1.1.1 Pendapatan Daerah

Secara garis besar, akun pendapatan daerah terdiri atas tiga kelompok, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PAD terdiri atas: (1) Penerimaan Pajak Daerah; (2) Penerimaan Retribusi Daerah; (3) Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan (4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Adapun Penerimaan Dana Perimbangan bersumber dari: (1) Bagi Hasil Pajak; (2) Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA); (3) Dana Alokasi Umum; dan (4) Dana Alokasi Khusus. Sedangkan penerimaan Lain-Lain Pendapatan yang Sah bersumber dari: (1) Bantuan/Hibah; (2) Dana Penyesuaian; dan (3) Dana Darurat.

Sepanjang Tahun Anggaran 2011-2015, pendapatan daerah Kabupaten Barru menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan, yaitu dari Rp 533.225.695.407,48 pada Tahun 2011, menjadi Rp 919.249.333.958,60 pada Tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kurun waktu lima tahun, pendapatan daerah Kabupaten Barru meningkat sebesar Rp 386.023.638.551,12 atau 72,39%, dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 15,69%. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 3.1.

Penjelasan lebih rinci dari setiap komponen pendapatan daerah adalah:

a. Pendapatan Asli Daerah

Selama periode 2011-2015, PAD mengalami peningkatan dari Rp 16.832.795.188,5 pada tahun 2011 menjadi Rp 56.315.635.019,24 di tahun 2015 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 35,68 persen. Beberapa komponen PAD antara lain yaitu pertama, pajak daerah mengalami pertumbuhan rata-rata pertahunnya sebesar 32,33 persen per tahun dengan besaran pertumbuhan dari Rp. 3.101.608.698,00 pada tahun 2011 menjadi Rp 10.425.113.973,88 pada tahun 2015. Kedua, retribusi daerah berfluktuasi tiap tahun dengan kondisi cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan pertahunnya sebesar 54,94 puncak tertinggi peningkatannya berada pada tahun 2013 yaitu sebesar Rp. 22.550.512.777. Ketiga, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan meningkat dari Rp. 4.536.188.449 pada tahun 2011 menjadi Rp. 7.132.064.625,90 pada tahun 2015 dengan rata-rata pertumbuhan pertahun

sebesar 13,59 persen. Dan komponen pendapat asli daerah yang keempat yaitu lain-lain pendapatan daerah yang sah. Komponen ini mengalami peningkatan dari Rp 4.709.153.360,00 pada tahun 2011 menjadi Rp 33.837.677.643,46 pada tahun 2015 dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 62,69 persen.

Tabel 3.1
Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2011-2015
Kabupaten Barru

No	Jenis Pendapatan	Tahun					Rata2 Pertumbuhan
		2011	2012	2013	2014	2015*	
I	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	16.832.795.188,50	29.597.599.741,05	38.904.230.296,12	45.076.356.508,76	56.315.635.019,24	35,68
a	Pajak Daerah	3.101.608.320,50	4.222.608.698,00	5.091.142.894,00	8.700.951.832,96	10.425.113.973,88	32,33
b	Retribusi Daerah	4.485.845.059,00	15.741.503.346,00	22.550.512.777,00	15.922.303.552,00	4.920.778.776,00	54,94
c	Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan	4.536.188.449,00	4.456.330.798,05	4.677.799.752,00	5.440.253.578,00	7.132.064.625,90	13,59
d	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	4.709.153.360,00	5.177.156.899,00	6.584.774.873,12	15.012.847.545,80	33.837.677.643,46	62,69
II	Dana Perimbangan (Transfer)	365.693.503.445,00	428.158.964.697,00	484.054.131.583,00	540.104.376.560,00	680.800.537.030,00	16,08
a	Dana bagi hasil	27.507.585.445,00	27.222.196.697,00	25.756.915.583,00	18.213.941.560,00	15.307.117.030,00	(9,58)
b	Dana alokasi umum	299.206.618.000,00	358.904.488.000,00	417.942.379.000,00	471.135.015.000,00	488.014.810.000,00	13,08
c	Dana alokasi khusus	38.979.300.000,00	42.032.280.000,00	40.354.837.000,00	50.755.420.000,00	177.478.610.000,00	59,76
III	Lain-lain pendapatan yang sah	150.699.396.773,98	71.869.308.593,99	89.049.086.925,40	108.917.320.989,51	182.133.161.909,36	19,54
a	Hibah	0	0	0	0	4.822.071.000,00	
b	Dana darurat	0	0	0	0		
c	Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada Kab./Kota	21.610.681.973,98	15.643.312.713,99	16.067.405.365,40	28.870.005.704,51	31.816.680.109,36	32,02
d	Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus	127.968.714.800,00	46.466.624.000,00	62.718.425.000,00	68.550.417.000,00	138.025.150.000,00	24,63
e	Bantuan keuangan dari provinsi/pemerintah daerah lainnya	1.120.000.000,00	9.759.371.880,00	10.263.256.560,00	11.496.898.285,00	7.469.260.800,00	133,30
	Jumlah Pendapatan	533.225.695.407,48	529.625.873.032,04	612.007.448.804,52	694.098.054.058,27	919.249.333.958,60	15,96

Sumber : DPKD Kabupaten Barru, Tahun 2015

b. Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Selama periode 2011-2015, dana perimbangan mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 16,08 persen. Peningkatan terbesar pada Dana Perimbangan berasal dari Dana Alokasi Khusus yang memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 59,76 persen. Untuk Dana Bagi Hasil mengalami perlambatan rata-rata sebesar 9,58 persen atau beradadibawah Dana Alokasi Umum yang memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 13,08 persen.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari provinsi kepada Kabupaten/Kota, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus serta Bantuan Keuangan dari Provinsi/Pemerintah Daerah Lainnya. Dalam kurun waktu 2011-2015, Bantuan Keuangan dari Provinsi/Pemerintah Daerah Lainnya mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 133,30 persen pertahun. Untuk Dana Bagi Hasil Pajak dari provinsi kepada Kabupaten/Kota mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 32,02 persen, demikian pula halnya untuk Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 24,63 persen.

Secara rinci proporsi sumber-sumber Pendapatan Daerah didalam APBD Kabupaten Barru digambarkan dalam Tabel 3.2. berikut ini :

Tabel 3.2

Proporsi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2011-2015

Kabupaten Barru

No	REALISASI ANGGARAN	Tahun Anggaran					Rata2 Pertumbuhan
		2011	2012	2013	2014	2015	
I	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	3,16	5,59	6,36	8,45	10,56	31,66
1	Pajak Daerah	0,58	0,80	0,83	1,25	1,13	(2,93)
2	Retribusi Daerah	0,84	2,97	3,68	2,99	0,92	18,71
3	Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan	0,85	0,84	0,76	1,02	1,34	(8,57)
4	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	0,88	0,98	1,08	2,16	3,68	18,99
II	Dana Perimbangan (Transfer)	68,58	80,84	79,09	77,81	74,06	0,78
1	Dana bagi hasil	5,16	5,14	4,21	2,62	1,67	(25,89)
2	Dana alokasi umum	56,11	67,77	68,29	67,88	53,09	(6,45)
3	Dana alokasi khusus	7,31	7,94	6,59	7,31	19,31	27,86
III	Lain-lain pendapatan yang sah	28,26	13,57	14,55	15,69	19,81	0,82
1	Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	
2	Dana darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada Kab./Kota	4,05	2,95	2,63	4,16	3,46	(11,25)
4	Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus	24,00	8,77	10,25	9,88	15,01	(13,80)
5	Bantuan keuangan dari provinsi/pemerintah daerah lainnya	0,21	1,84	1,68	1,66	0,81	123,76
Jumlah Pendapatan		100	100	100	100	100	

Sumber : DPKD dan Bappeda Kabupaten Barru (Diolah), Tahun 2015

Berdasarkan tabel 3.2 menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tahun 2011-2015, proporsi rata-rata pertumbuhan PAD sebesar 31,66 persen, dana perimbangan sebesar 0,78 persen dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 0,82 persen terhadap total pendapatan. Tabel tersebut juga menunjukkan bahwa dana perimbangan mendominasi pendanaan pembangunan dan pemerintahan di Kabupaten Barru. Penyumbang terbesar dana perimbangan adalah Dana Alokasi Umum meskipun secara rata-rata pertumbuhannya mengalami perlambatan sebesar 6,76 persen. Penyumbang terbesar ke dua adalah dana alokasi khusus dan ketiga adalah dana bagi hasil.

Pada periode yang sama, sumber penerimaan PAD yang cukup berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah dengan menunjukkan rata-rata pertumbuhan kontribusinya sebesar 18,71 persen. Namun demikian, peningkatannya fluktuatif, diharapkan di masa depan bisa lebih menunjukkan peningkatan yang baik. Sumber penerimaan PAD yang lain seperti pajak daerah, hasil kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah juga menunjukkan peningkatan yang fluktuatif, hal ini berarti sumber PAD yang lain ini masih mempunyai peluang untuk lebih ditingkatkan. Ke depan, faktor-faktor penyebab penurunan angka tersebut harus menjadi perhatian agar ke depan tidak mengalami penurunan dan seluruh sumber-sumber PAD dapat memberi kontribusi yang cukup besar terhadap total pendapatan daerah.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa tingkat ketergantungan Pemerintah Kabupaten Barru terhadap pemerintah pusat didalam membiayai pembangunan daerah masih cukup tinggi.

3.1.1.2 Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Realisasi belanja daerah Kabupaten Barru dalam kurun waktu Tahun 2011-2015 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.3

Pertumbuhan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011-2015
Kabupaten Barru

No	REALISASI ANGGARAN	Tahun					Rata2 Pertumbuhan
		2011	2012	2013	2014	2015	
	Belanja (b.1+b.2)	517.766.736.205,51	518.007.466.533,45	571.036.944.883,47	639.587.356.514,52	883.640.392.643,15	18,57
I	Belanja Tidak Langsung	278.338.561.353,00	314.606.110.667,45	355.898.943.575,47	393.375.374.209,52	453.890.849.902,92	14,57
1	Belanja pegawai	259.584.078.157,00	290.523.540.235,00	316.309.973.801,00	346.900.553.138,00	370.536.947.268,00	12,75
2	Bunga	1.701.300.000,00	7.695.618.775,45	2.382.353.636,47	3.720.580.790,52	3.387.446.739,92	1413,92
3	Subsidi	0,00	0,00	0,00		0,00	
4	Hibah	1.800.968.500,00	4.579.974.100,00	7.683.295.500,00	12.215.005.150,00	35.717.419.620,00	78,02
5	Bantuan social	1.149.739.696,00	394.500.000,00	364.096.422,00	363.726.131,00	454.472.859,00	-8,81
6	Belanja bagi hasil	0	0,00	217.812.500,00	0,00	0,00	
7	Bantuan Keuangan	14.102.475.000,00	11.406.477.557,00	28.885.311.716,00	30.175.509.000,00	43.794.563.416,00	38,05
8	Belanja tidak terduga	0	6.000.000,00	56.100.000,00	0	-	
II	Belanja Langsung	239.428.174.852,51	203.401.355.866,00	215.138.001.308,00	246.211.982.305,00	429.749.542.740,23	25,77
1	Belanja pegawai	19.895.462.440,00	22.311.668.700,00	17.811.471.720,00	11.387.662.500,00	11.964.525.300,00	-4,20
2	Belanja barang dan jasa	61.676.658.458,00	73.470.870.396,00	95.806.754.628,00	114.378.240.832,00	127.142.514.903,00	23,94
3	Belanja modal	157.856.053.954,51	107.618.816.770,00	101.519.774.960,00	120.446.078.973,00	290.642.502.537,23	36,21
	Jumlah Belanja	517.766.736.205,51	518.007.466.533,45	571.036.944.883,47	639.587.356.514,52	883.640.392.643,15	18,57

Sumber : DPKD Kabupaten Barru, Tahun 2015

Berdasarkan Tabel 3.3 terlihat bahwa dalam kurun waktu 2011-2015 belanja daerah mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan pendapatan daerah. Belanja daerah meningkat dari Rp 517.766.736.205,51 di tahun 2011 meningkat menjadi Rp 883.640392.643,15 pada tahun 2015 atau bertumbuh dengan rata-rata 18,57 persen per tahun. Meskipun demikian, rata-rata pertumbuhannya lebih besar dari rata-rata pertumbuhan pendapatan.

Dalam periode tersebut, terdapat dua komponen belanja daerah yaitu pertama, belanja tidak langsung dimana dalam kurun waktu lima tahun bertumbuh dari Rp. 278.338.561.353 pada tahun 2011 menjadi Rp.453.890.849.902,92 pada tahun 2015 dengan rata-rata pertumbuhan pertahunnya sebesar 14,37 persen. Kedua, Belanja Langsung juga mengalami peningkatan dari Rp. 239.428.174.852,51 pada tahun 2011 menjadi Rp. 429.749.542.740,23 pada tahun 2015 dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 25,77 persen.

Dari penjelasan tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan belanja langsung belanja langsung lebih besar dibandingkan dengan belanja tidak langsung. Hal tersebut merupakan gambaran dari komitmen Pemerintah Kabupaten Barru terhadap pembangunan masyarakat. Walaupun demikian proporsi belanja tidak langsung masih lebih besar dari belanja langsung. Hal tersebut ditunjukkan dalam tabel 3.4 berikut ini.

Tabel 3.4

Proporsi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011-2015
Kabupaten Barru

No	REALISASI ANGGARAN	Tahun Anggaran					Rata2 Pertumbuhan
		2011	2012	2013	2014	2015	
	Belanja (b.1+b.2)	100	100	100	100	100,00	0,000
I	Belanja Tidak Langsung	53,76	60,73	62,33	61,5	51,37	-2,197
1	Belanja pegawai	93,26	92,35	88,88	88,19	41,93	-10,651
2	Bunga	0,61	2,45	0,67	0,95	0,38	1242,226
3	Subsidi	0	0	0	0	-	
4	Hibah	0,65	1,46	2,16	3,11	4,04	32,068
5	Bantuan social	0,41	0,13	0,1	0,09	0,05	-31,761
6	Belanja bagi hasil	0	3,63	0,06	7,67	-	
7	Bantuan Keuangan	5,07	0	8,12	0	4,96	
8	Belanja tidak terduga	0	0	0,02	0	-	
II	Belanja Langsung	46,24	39,27	37,67	38,5	48,63	4,393
1	Belanja pegawai	8,31	10,97	8,28	4,63	1,35	-25,641
2	Belanja barang dan jasa	25,76	36,12	44,53	46,46	14,39	-1,511
3	Belanja modal	65,93	52,91	47,19	48,92	32,89	-10,660
	Jumlah Belanja	100	100	100	100	100	

Sumber : DPKD dan Bappeda Kabupaten Barru (Diolah), Tahun 2015

Proporsi Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja Daerah mengalami penurunan dari 53,76 pada tahun 2011 menjadi 51,37 pada tahun 2015 dengan rata-rata penurunan sebesar 2,20 persen per tahun. Hal tersebut dipengaruhi oleh penurunan proporsi belanja pegawai dari 93,26 persen pada tahun 2011 menjadi 2015 dengan rata-rata penurunan per tahun sebesar 10,65 persen.

Untuk proporsi belanja langsung, mengalami peningkatan setiap tahunnya dari 46,24 persen pada tahun 2011 menjadi 48,63 persen pada tahun 2015 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,39 persen.

3.1.1.3 Neraca Daerah

Neraca Daerah merupakan gambaran keuangan Pemerintah Kabupaten Barru yang terdiri atas asset, kewajiban dan ekuitas. Laporan neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintahan daerah. Gambaran Neraca Daerah Pemerintah Kabupaten Barru tahun 2011-2015 disajikan pada tabel Berikut ini.

Tabel 3.5

Neraca Keuangan Tahun Anggaran 2011-2015
Kabupaten Barru

NO	URAIAN	Tahun					RATA2 PERTUMBUHAN
		2011	2012	2013	2014	2015*	
1	ASET						
1.1	ASET LANCAR	61.393.942.861,54	58.091.740.862,91	96.801.962.980,45	155.200.713.561,52	183.258.806.667,58	7,76
A	Kas	56.221.612.433,09	47.908.968.817,62	86.084.547.266,67	135.628.196.672,16	167.224.139.457,55	9,11
	Kas di Kas Daerah	54.038.701.493,63	45.480.038.577,62	84.184.668.904,67	133.925.599.823,16	165.394.028.922,35	9,37
	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.998.082.269,46	2.397.439.240,00	1.883.099.612,00	171.399.619,00	363.405.641,00	-2,60
	Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN	-	-	-	1.518.838.230,00	1.429.445.699,00	-1,18
	Kas di Bendahara Penerimaan	184.828.670,00	31.491.000,00	16.778.750,00	12.359.000,00	37.259.195,20	11,93
	Investasi Jangka Pendek	-	-	-	-		0,00
	Piutang	409.579.750,00	2.679.981.789,00	3.287.531.614,50	5.650.409.407,90		112,86
	Piutang Pajak	-	559.925.623,00	236.291.515,00	2.598.921.289,57	3.567.141.589,53	195,87
	Piutang Retribusi	16.366.000,00	1.734.342.416,00	1.787.358.212,00	2.317.371.557,00	2.478.850.923,00	2095,39
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-	-	-		0,00

	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-	-	-		0,00
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-	-	-		0,00
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-	-	-		0,00
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	13.100.000,00	12.100.000,00	7.640.000,00	7.640.000,00	206.110.000,00	511,25
	Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan	-	-	-	-		0,00
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-	-	-	908.235.500,00	0,00
	Piutang Lainnya	380.113.750,00	373.613.750,00	1.278.642.105,00	1.194.007.105,00	748.246.218,00	39,31

	Penyisihan Piutang	-	-	-22.400.217,50	-467.530.543,67	(827.817.339,39)	412,85
	Beban dibayar dimuka					59.185.271,69	0,00
	Persediaan	4.353.170.928,45	4.822.808.467,29	4.142.352.484,78	8.271.698.073,56	8.894.715.047,20	-2,89
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	18.624.609.151,00	20.124.894.777,00	19.880.452.593,66	21.389.152.407,66	48.824.540.433,62	29,91
A	Investasi Non Permanen	3.814.609.150,00	4.314.894.776,00	2.770.452.592,66	2.279.152.406,66	1.780.409.675,62	-8,30
	Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-	-	-		0,00
	Pinjaman Jangka Perusahaan Daerah	-	-	-	-		0,00
	Pinjaman Jangka Perusahaan Daerah Lainnya	-	-	-	-		0,00
	Investasi Dalam Surat Utang Negara	-	-	-	-		0,00
	Investasi Dalam Proyek Pembangunan	-	-	-	-		0,00

	Investasi Non Permanen Lainnya	3.814.609.150,00	4.314.894.776,00	2.770.452.592,66	2.279.152.406,66	1.780.409.675,62	-8,30
B	Investasi Permanen	14.810.000.001,00	15.810.000.001,00	17.110.000.001,00	19.110.000.001,00	47.044.130.758,00	35,05
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	14.810.000.001,00	15.810.000.001,00	17.110.000.001,00	19.110.000.001,00	47.044.130.758,00	35,05
	Investasi Pemerintah Lainnya	-	-	-	-		0,00
1.3	ASET TETAP	1.680.835.596.694,55	1.783.244.609.501,17	1.882.707.512.371,49	1.967.765.953.669,41	1.151.684.947.543,14	-7,38
	Tanah	168.823.521.167,00	171.314.465.047,00	172.615.748.487,00	173.413.872.007,00	173.602.239.307,00	0,29
	Peralatan dan Mesin	143.943.825.210,77	164.139.723.367,77	171.950.374.155,17	163.504.864.722,60	214.333.627.030,83	3,41
	Gedung dan Bangunan	389.725.547.463,93	436.810.589.962,00	471.261.457.070,27	528.353.648.451,27	570.577.110.496,27	5,47
	Jalan, irigasi, dan Jaringan	853.657.021.348,89	924.312.133.594,65	949.765.489.719,65	1.049.109.360.421,65	1.187.252.623.336,65	6,32
	Aset Tetap Lainnya	39.750.688.142,00	47.615.117.120,00	51.539.983.520,04	52.238.358.229,39	60.144.347.394,39	3,72
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	84.934.993.361,96	39.052.580.409,75	65.574.459.419,36	1.145.849.837,50	72.063.590.129,00	1161,05
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-	-	-	-	(1.126.288.590.151,00)	0,00

1.4	DANA CADANGAN	-	-	-	-	-	0,00
1.5	ASET LAINNYA	522.483.432,00	14.217.282.548,58	22.718.708.764,05	51.193.299.332,70	10.052.549.339,45	562,93
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-	-	-	-	0,00
	Tuntutan Perbendaharaan	-	-	-	-	905.325.731,00	0,00
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-	-	881.030.000,00	-	0,00
	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	522.483.432,00	450.040.868,00	460.883.835,00	455.896.733,00	-	-22,03
	Aset Tak Berwujud	-	-	-	-	-	0,00
	Aset Lain-Lain	-	13.767.241.680,58	22.257.824.929,05	49.856.372.599,70	9.147.223.608,45	20,80
	JUMLAH ASET DAERAH	1.760.967.052.389,09	1.872.998.545.900,66	2.018.821.105.095,15	2.189.898.709.563,39	1.393.820.843.983,79	-5,31
2	KEWAJIBAN	74.370.202.097,54	56.460.728.536,55	62.380.096.102,87	50.246.346.621,40	71.760.578.362,06	1,95
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	28.574.733.133,54	10.665.259.572,55	16.584.627.138,87	10.556.940.185,92	35.124.203.190,84	36,55
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	239.879.923,00	211.669.575,00	22.103.893,00	37.556.769,00	37.556.081,00	-8,91
	Utang Bunga	8.106.992.150,38	2.414.989.032,35	3.784.168.647,24	396.732.932,15	3.141.050.155,62	117,74
	Utang Pajak	-	-	-	-	-	0,00

	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	575.650.143,20	-	3.053.031.264,27	3.053.031.264,27	3.053.031.264,27	-92,56
	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-	0,00
	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	-	-	-	-	0,00
	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-	-	-	-	0,00
	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Obligasi	-	-	-	-	-	0,00
	Utang Beban					559.925.330,67	0,00
	Pendapatan diterima dimuka/Pendapatan diterima dimuka					12.378.261,31	0,00

	Bagian Lancar Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-	-	-		0,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-	422.110.800,00	1.153.022.105,00		14,63
	Utang Kepada Pihak Ketiga	19.652.210.916,96	8.038.600.965,20	9.303.212.534,36	5.916.597.115,50	28.320.262.097,97	64,96
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	45.795.468.964,00	45.795.468.964,00	45.795.468.964,00	39.689.406.435,48	36.636.375.171,22	-76,84
	Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-	-	39.689.406.435,48	36.636.375.171,22	-1,54
	Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-		0,00
	Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	45.795.468.964,00	45.795.468.964,00	45.795.468.964,00	-		-97,76

	Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-	-	-		0,00
	Utang Dalam Negeri - Obligasi	-	-	-	-		0,00
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-		0,00
3	EKUITAS DANA	1.686.596.850.291,55	1.816.537.817.364,11	1.956.441.008.992,28	2.139.652.362.941,99	1.322.060.265.621,73	-2,69
3.1	Ekuitas Dana Lancar	32.409.629.978,00	44.746.499.501,36	76.929.804.227,08	138.993.363.967,70	148.134.603.476,74	-114,73
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	55.971.432.091,09	47.665.808.242,62	86.045.664.623,67	135.578.280.903,16	167.224.139.457,55	8,84
	Pendapatan Yg Ditanggungan	184.828.670,00	31.491.000,00	16.778.750,00	12.359.000,00		-48,36
	Cadangan Piutang	409.579.750,00	2.679.981.789,00	3.287.531.614,50	5.650.409.407,90	7.139.952.162,83	138,14
	Cadangan Persediaan	4.353.170.928,45	4.822.808.467,29	4.142.352.484,78	8.271.698.073,56	8.894.715.047,20	-2,89
	Cadangan Penyisihan Piutang	-	-	-	-		0,00
	Dana Yg Hrs disediakan untuk pembayaran	-28.509.381.461,54	-10.453.589.997,55	-16.562.523.245,87	-10.519.383.416,92	(35.124.203.190,84)	37,09

	utang jangka pendek						
3.2	Ekuitas Dana Investasi	1.654.187.220.313,55	1.771.791.317.862,75	1.879.511.204.765,20	2.000.658.998.974,29	1.173.925.662.144,99	-6,09
	Diinvestasikan Dalam Investasi Non Permanen	-	-	-	-		0,00
	Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang	18.624.609.151,00	20.124.894.777,00	19.880.452.593,66	21.389.152.407,66	48.824.540.433,62	24,00
	Diinvestasikan Dalam Aset tetap	1.680.835.596.694,55	1.783.244.609.501,17	1.882.707.512.371,49	1.967.765.953.669,41	1.151.684.947.543,14	-7,38
	Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	522.483.432,00	14.217.282.548,58	22.718.708.764,05	51.193.299.332,70	10.052.549.339,45	562,93
	Dana Yg Harus Disediakan Untuk Utang Jangka Panjang	-45.795.468.964,00	-45.795.468.964,00	-45.795.468.964,00	-39.689.406.435,48	(36.636.375.171,22)	-76,84
3.3	Ekuitas Dana Cadangan	-	-	-	-		0,00
	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	-	-	-	-		0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1.760.967.052.389,09	1.872.998.545.900,66	2.018.821.105.095,15	2.189.898.709.563,39	1.393.820.843.983,79	-5,31

Sumber : DPKD, Tahun 2015

Berdasarkan Neraca Daerah Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2011-2015 tersebut, maka hasil analisis neraca daerah sebagai berikut :

a. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Didalam Komponen Rasio Likuiditas ini ada 2 (dua) komponen rasio yang dihitung yaitu Rasio Lancar dengan formula aset lancar dibagi dengan kewajiban jangka pendek dan Rasio Ouick dengan formula adalah aset lancar dikurangi persediaan dibagi dengan kewajiban jangka pendek. Berdasarkan formula tersebut maka hasil Perhitungan untuk Rasio Likuiditas Neraca Keuangan Pemerintah Kabupaten Barru selama kurun waktu 2011-2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6

Rasio Likuiditas Kabupaten Barru Tahun 2011-2015

No	Uraian	Tahun Anggaran				
		2011	2012	2013	2014	2015
	Rasio Likuiditas					
1	Rasio Lancar (%)	2,13	5,20	5,64	14,17	3,31
2	Rasio Quick (%)	1,98	4,74	5,39	13,38	3,14

Sumber :Data Olahan BAPPEDA Kabupaten Barru, Tahun 2015

Berdasarkan Tabel 3.6 di atas, menunjukkan Rasio Lancar Pemerintah Kabupaten Barru dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terus mengalami peningkatan dimana pada Tahun 2011 sebesar 2,13 persen dan pada Tahun 2015 meningkat hingga mencapai 3,31 persen. Begitupun dengan rasio quick juga mengalami peningkatan dari 1,98 persen pada tahun 2011 menjadi 3,14 pada tahun 2015. Hal ini berarti Pemerintah Kabupaten Barru mampu memenuhi kewajiban keuangannya dalam jangka pendek.

b. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjang. Adapun rasio yang digunakan untuk menghitung Rasio Solvabilitas ini adalah Rasio Total Hutang terhadap total Aset yang secara langsung membandingkan Total Kewajiban (Kewajiban Jangka Pendak dan Kewajiban Jangka Panjang) dibagi dengan Total Asset. Sedangkan untuk Rasio Total Hutang terhadap Ekuitas secara langsung membandingkan Total kewajiban dibagi dengan ekuitas.

Berdasarkan formula terbut maka hasil dari Rasio Solvabilitas Neraca Daerah Pemerintah Kabupaten Barru selama 5(lima) tahun terakhir tahun 2011-2016 sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 3.7
Rasio Solvabilitas Kabupaten Barru Tahun 2011-2015

No	Uraian	Tahun Anggaran				
		2011	2012	2013	2014	2015
	Rasio Solvabilitas					
1	Rasio Total Hutang terhadap total Asset (%)	0,042	0,030	0,031	0,023	0,068
>	Rasio Total Hutang terhadap Ekuitas (%)	0,044	0,031	0,032	0,023	1,072

Sumber :Data OlahanBAPPEDA Kabupaten Barru, Tahun 2015

Berdasarkan Tabel 3.7 di atas, menunjukkan Rasio Solvabilitas Pemerintah Kabupaten Barru dalam kurun waktu 5 (lima) tahun berfluktuatif, namun cenderung meningkat diakhir periode, hal ini dengan meningkatnya rasio total hutang terhadap total aset pada Tahun 2011 sebesar 0,024 persen mengalami peningkatan pada tahun 2015 menjadi 0,068 persen. Begitupun dengan rasio total hutang terhadap ekuitas dari, 0,044 persen pada tahun 2011 menjadi 1,072 persen pada tahun 2015.

c. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas adalah rasio yang menunjukkan seberapa lama tingkat perputaran piutang dan persediaan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Barru untuk terkonversi menjadi kas untuk mendukung pelayanan publik. Rasio Aktivitas selama 5 (lima) tahun terakhir tahun 2011-2016 sebagaimana disajikan pada Tabel 3.8 berikut.

Tabel 3.8
Rasio Aktivitas Kabupaten Barru Tahun 2011-2015

No	Uraian	Tahun Anggaran				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Rata-Rata Umur Piutang	1,06	2,06	2,67	2,96	1,09
2	Rata-rata Umur Persediaan	266,08	347,23	394,98	273,89	347,19

Sumber : Data Olahan BAPPEDA Kabupaten Barru, Tahun 2015

Berdasarkan Tabel 3.8 di atas, menunjukkan Rasio Aktivitas Pemerintah Kabupaten Barru dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terus mengalami peningkatan hal tersebut ditunjukkan dengan peningkatan rata-rata umur piutang dari 1,06 pada Tahun 2011 menjadi 1,09 pada Tahun 2015. Begitupun dengan rata-rata umur persediaan juga mengalami peningkatan dari 266,08 hari menjadi 347,19 hari pada tahun 2015. Peningkatan rasio ini menunjukkan bahwa kualitas pengelolaan piutang dan pengelolaan persediaan relatif masih butuh perbaikan.

3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

Terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, pemerintah memberikan pedoman dasar dengan menerbitkan PP No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah setelah sebelumnya menerbitkan Kepmendagri No. 29/2002 tentang Pedoman

Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD dan Penyusunan Perhitungan APBD. Kepmendagri ini kemudian direvisi menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

Dinamisnya legalitas pengelolaan keuangan daerah tersebut ditujukan untuk menciptakan pengelolaan keuangan publik di daerah yang akuntabel, transparan dan berkinerja untuk mendorong akselerasi pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat. Keuangan daerah diharapkan mampu secara efisien mengalokasikan sumber daya pembangunan daerah, semata-mata untuk kepentingan masyarakat. Keuangan daerah harus mampu teralokasi kembali secara tepat untuk kepentingan masyarakat, karena uang yang dikelola oleh pemerintah daerah memang berasal dari masyarakat itu sendiri. Faktanya, dalam era desentralisasi dan otonomi daerah, antara kepentingan masyarakat dengan alokasi belanja daerah seringkali tidak sejalan. Kepentingan masyarakat jika tidak diidentifikasi secara baik, tidak direncanakan secara cermat oleh pemerintah daerah, seringkali justru menimbulkan pemborosan dan ketidakefisienan belanja daerah. Akibatnya, kebutuhan belanja (*fiscal needs*) akan senantiasa tidak terkendali besarnya. Sebaliknya, pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Barru memiliki keterbatasan untuk menarik uang dari masyarakat, karena di samping akan berdampak negatif pada melemahkan daya beli masyarakat dan timbulnya biaya tinggi bagi investasi dan industri lokal, juga kondisi sebagian besar masyarakat masih berada dalam tekanan kemiskinan yang berkepanjangan.

Keragu-raguan Pemerintah Kabupaten dalam meningkatkan pendapatan daerah ini menyebabkan kemampuan keuangan daerah (*fiscal capacity*) menjadi sangat rendah. Kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) yang rendah dan kebutuhan fiskal (*fiscal needs*) yang tinggi, menyebabkan terjadinya kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) yang semakin lebar, oleh karena itu untuk memperkecil kesenjangan fiskal tersebut, diperlukan pengelolaan keuangan daerah secara tepat untuk menciptakan efisiensi keuangan daerah. Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk mengelola belanja daerah secara cermat, efisiensi belanja pegawai, operasional dan pemeliharaan, belanja pelayanan publik yang tepat sasaran, belanja modal pada sektor-sektor yang strategis dan akseleratif dalam menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan daerah secara berkesinambungan, serta belanja daerah yang mampu menumbuhkan partisipasi masyarakat terhadap peningkatan kualitas sarana dan fasilitas publik.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan dan Belanja Daerah

Adapun kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Barru Tahun 2011-2015 dibagi atas;

A. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah pada tahun 2011-2015 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. Untuk itu digariskan sejumlah kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah, antara lain :

1. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan dengan membangun ketaatan wajib pajak dengan pertumbuhan pengendalian dan pengawasan yang dibarengi dengan pertumbuhan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan dengan biaya murah.
2. Mendayagunakan kekayaan daerah yang belum dipisahkan sehingga menghasilkan pendapatan.
3. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi pada pemerintah Pusat dan Propinsi dalam rangka pertumbuhan bagi hasil dan dana perimbangan keuangan dari pemerintah tingkat atas.
4. Memantapkan perencanaan penerimaan Daerah sesuai dengan potensi sumber-sumber pendapatan daerah yang sah.
5. Mengembangkan sumber-sumber penerimaan yang potensial
6. Memantapkan dan melakukan perbaikan sistem akuntansi pendapatan daerah
7. Mengoptimalkan penerimaan sumber-sumber pendapatan yang ada sesuai ketentuan perundang-undangan dan dilakukan secara terencana sesuai kondisi perekonomian dengan memperhatikan kendala, potensi yang ada baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah maupun yang bersumber dari penerimaan lainnya.
8. Pertumbuhan pengendalian dan pengawasan terhadap pemungutan PAD serta pertumbuhan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.
9. Memantapkan pengendalian pengelolaan penerimaan daerah
10. Mengembangkan kebijakan pendapatan daerah yang dapat diterima masyarakat, partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan
11. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi pada pemerintah Pusat dan Propinsi dalam rangka pertumbuhan bagi hasil dan dana perimbangan keuangan dari pemerintah tingkat atas.

B. Kebijakan Belanja Daerah

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun Anggaran 2011-2015, disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya.

Penentuan besaran belanja yang dianggarkan mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, serta prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas. Adapun Kebijakan belanja daerah Tahun Anggaran 2011-2015 dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan, antara lain :

1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja melalui pertumbuhan disiplin anggaran dan pengeluaran dana sesuai kebutuhan riil.
2. Mengoptimalkan belanja dalam rangka menuju pertumbuhan pembangunan kepada masyarakat secara proporsional.
3. Melakukan pemantapan dan perbaikan sistem akuntansi belanja berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
4. Meningkatkan peran dan fungsi pengelola keuangan SKPD (Bendahawan Pengeluaran, Bendaharawan Penerimaan, PPK-SKPD dan PPTK).

3.2.2 Pembiayaan Daerah

Untuk menyalurkan surplus dan menutup defisit, dalam penganggaran dikenal pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pembiayaan meliputi hal-hal berikut :

1. Kebijakan penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayarkan kembali pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah dan penerimaan piutang daerah.
2. Kebijakan pengeluaran pembiayaan adalah :
 - a. Penyertaan modal dan pemberian pinjaman manakala terjadi surplus anggaran

- b. Penyertaan modal BUMD dengan upaya revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD serta pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan.

3.3. KERANGKA PENDANAAN

Tujuan dari analisis Kerangka Pendanaan Tahun 2016-2021 ini adalah untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun kedepan. Adapun langkah awal yang harus dilakukan adalah dengan mengidentifikasi semua sumber-sumber penerimaan dan ke pos-pos mana saja sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengalokasian sumber penerimaan kedalam pos belanja dan pengeluaran antara lain :

- a. Alokasi belanja yang pembiayaannya berasal dari penerimaan retribusi pajak diupayakan agar berhubungan langsung dengan peningkatan pelayanan dimana retribusi pajak tersebut dipungut.
- b. Penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan dialokasikan kembali untuk upaya-upaya peningkatan kapasitas dimana dana penyertaan dialokasikan sehingga menghasilkan tingkat pengembalian investasi terbaik bagi kasdaerah.
- c. Untuk Dana Alokasi Umum, maka pengalokasiannya diprioritaskan bagi belanja umum pegawai dan operasional rutin Pemerintahan Daerah sedangkan pengalokasian Dana Alokasi Khusus disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dari SKPD penerima Dana DAK tersebut.
- d. Penerimaan Dana bagi Hasil agar dialokasikan secara memadai untuk perbaikan pelayanan atau perbaikan lingkungan sesuai jenis dana bagi hasil tersebut didapat.

3.3.1 Analisis Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta prioritas utama

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat ditujukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayarkan dalam satu tahun anggaran. Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta prioritas utama kabupaten Barru pada kurun waktu 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.9

Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama

Kabupaten Barru Tahun 2011 – 2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
	Belanja Tidak Langsung	295.816.532.934,00	331.080.811.544,00	386.892.424.844,00	440.249.164.070,98	469.850.866.281,38
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	221.311.743.346,00	251.409.577.992,00	272.288.686.006,00	293.463.144.362,00	303.816.897.044,40
2	Tambahan Penghasilan PNS	43.956.511.474,00	47.185.862.172,00	76.596.116.659,00	106.654.096.000,00	120.171.063.309,00
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	944.880.000,00	834.000.000,00	944.880.000,00	1.669.600.000,00	1.761.600.000,00
4	Belanja Pemungutan Pajak Daerah	327.921.634,00	276.757.500,00	100.000.000,00	-	458.000.000,00
5	Belanja Bunga	20.846.077,00	4.000.000.000,00	5.400.000.000,00	5.191.298.035,98	5.191.298.035,98
6	Belanja Subsidi					
7	Belanja Hibah	3.363.379.090,00	2.787.933.000,00	1.692.483.000,00	2.591.778.996,00	2.800.000.000,00
8	Belanja Bantuan Sosial	1.158.700.000,00	1.300.700.000,00	1.352.446.677,00	511.746.677,00	500.000.000,00
9	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	-		217.812.502,00	-	-
10	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	24.340.000.000,00	22.985.980.880,00	27.000.000.000,00	30.167.500.000,00	35.152.007.892,00
11	Belanja Tidak Terduga	392.551.313,00	300.000.000,00	1.300.000.000,00		
	Belanja Langsung	19.070.161.714,00	22.814.828.628,00	33.381.924.661,00	38.976.614.750,00	52.782.843.562,00
1	Belanja Honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis	-				
2	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	476.000.000,00	185.000.000,00	125.000.000,00	98.500.000,00	113.500.000,00

3	Belanja Jasa Kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik,air, telepon dll)	2.531.015.000,00				6.250.410.147,00
4	Belanja sewa gedung kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	-				
5	Belanja Bahan Habis Pakai	2.506.561.279,00	2.260.731.092,00	2.592.926.251,00	2.281.996.291,00	3.267.769.037,00
6	Belanja Bahan/Material	8.471.833.024,00	15.279.170.215,00	24.140.790.160,00	29.365.237.430,00	31.643.038.678,00
7	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.114.852.085,00	2.052.335.000,00	2.747.947.250,00	2.584.830.000,00	3.258.905.000,00
8	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.212.146.082,00	2.086.562.577,00	2.706.819.400,00	3.318.681.600,00	3.509.227.650,00
9	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	30.530.000,00	55.400.000,00	35.500.000,00	50.590.200,00	101.960.000,00
10	Belanja Pemeliharaan	547.570.244,00	779.629.744,00	765.591.600,00	806.779.229,00	4.168.782.050,00
11	Belanja Jasa Konsultasi	179.654.000,00	116.000.000,00	267.350.000,00	470.000.000,00	469.251.000,00
12	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor (yang telah ada kontrak panjangnya)					
	Pembiayaan Pengeluaran	1.105.000.000,00	1.105.000.000,00	2.000.000.000,00	5.053.031.264,00	4.053.031.269,27
1	Pembentukan Dana Cadangan					
2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00
3	Pembayaran Pokok Utang	105.000.000,00	105.000.000,00	-	3.053.031.264,00	3.053.031.269,27
4	Pemberian Pinjaman Daerah					
	Total	315.991.694.648,00	355.000.640.172,00	422.274.349.505,00	484.278.810.084,98	526.686.741.112,65

Sumber : Dinas Pengelola keuangan Daerah, Tahun 2016

3.3.2 Proyeksi Data Masa Lalu

Hal utama yang perlu diperkirakan dalam penghitungan kemampuan anggaran adalah pendapatan daerah. Hal ini karena akan berkaitan dengan kapasitas pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada publik.

Proyeksi data masa yang akan datang merupakan proyeksi data untuk lima tahun kedepan yang didasarkan pada rata-rata pertumbuhan selama lima tahun yang lalu. Adapun proyeksi untuk lima tahun ke depan, meliputi : proyeksi pendapatan, belanja dan proyeksi pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama.

3.3.2.1 Proyeksi Pendapatan Daerah 2016 sampai dengan 2021

Analisis Proyeksi dilakukan berdasarkan beberapa faktor yang akan berpengaruh antara lain Angka rata-rata pertumbuhan setiap obyek pendapatan, kebijakan keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi. Hasil dari analisis tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.10
 Proyeksi Pendapatan Tahun 2016-2021
 Kabupaten Barru

No	Jenis Pendapatan	TAHUN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	64.690.536.626	67.925.063.457	71.321.316.630	74.887.382.462	78.631.751.585	82.563.339.164
a	Pajak Daerah	8.670.000.000	9.103.500.000	9.558.675.000	10.036.608.750	10.538.439.188	11.065.361.147
b	Retribusi Daerah	11.729.026.500	12.315.477.825	12.931.251.716	13.577.814.302	14.256.705.017	14.969.540.268
c	Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan	7.132.064.626	7.488.667.857	7.863.101.250	8.256.256.313	8.669.069.128	9.102.522.585
d	Lain-lain pendapatan Asli daerah yang sah	37.159.445.500	39.017.417.775	40.968.288.664	43.016.703.097	45.167.538.252	47.425.915.164
II	Dana Perimbangan (Transfer)	765.706.623.140	821.511.186.454	881.650.240.159	931.565.949.376	999.989.788.148	1.073.772.045.426
a	Dana bagi hasil	21.935.654.000	24.129.219.400	26.542.141.340	27.869.248.407	30.656.173.248	33.721.790.572
b	Dana alokasi umum	519.152.475.000	550.301.623.500	583.319.720.910	618.318.904.165	655.418.038.414	694.743.120.719
c	Dana alokasi khusus	224.618.494.140	247.080.343.554	271.788.377.909	285.377.796.805	313.915.576.485	345.307.134.134
III	Lain-lain pendapatan yang sah	183.405.937.940	192.576.234.837	202.205.046.579	212.315.298.908	222.931.063.853	234.077.617.046
A	Hibah		-	-	-	-	-
B	Dana darurat		-	-	-	-	-
C	Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada Kab./Kota	25.935.506.000	27.232.281.300	28.593.895.365	30.023.590.133	31.524.769.640	33.101.008.122
D	Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus	144.960.902.000	152.208.947.100	159.819.394.455	167.810.364.178	176.200.882.387	185.010.926.506
E	Bantuan keuangan dari provinsi/pemerintah daerah lainnya	10.812.943.440	11.353.590.612	11.921.270.143	12.517.333.650	13.143.200.332	13.800.360.349
F	Pendapatan Lainnya	1.696.586.500	1.781.415.825	1.870.486.616	1.964.010.947	2.062.211.494	2.165.322.069
Jumlah Pendapatan		1.013.803.097.706	1.082.012.484.748	1.155.176.603.368	1.218.768.630.746	1.301.552.603.585	1.390.413.001.635

Sumber : DPKD Kabupaten Barru, Tahun 2015

Dengan mempertimbangkan rata-rata pertumbuhan untuk setiap komponen pendapatan daerah dan sejalan dengan asumsi makro ekonomi dan kebijakan keuangan dari pemerintah daerah maupun dari pemerintah pusat, maka tingkat pendapatan daerah Kabupaten Barru dalam kurun waktu 2016-2021 diprediksikan meningkat dari Rp. 1.013.803.097.706 pada tahun 2016 menjadi Rp. 1.390.413.001.635 pada tahun 2021.

3.3.2.2 Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2016-2021

Proyeksi Belanja Daerah dilakukan dengan menggunakan asumsi-asumsi yang didasarkan pada data historis perkembangan pertumbuhan belanja tidak langsung dan belanja langsung beberapa tahun sebelumnya, rencana-rencana strategis Pemerintah Kabupaten Barrulima tahun kedepan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adapun Proyeksi Belanja Kabupaten Barru Tahun anggaran 2016-2021 dapat dilihat dalam tabel 3.11

Tabel 3.11

Proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011-2015
Kabupaten Barru

No	Jenis Belanja	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Belanja (b.1+b.2)	1.009.754.899.728,98	1.110.730.389.701,88	1.221.803.428.672,07	1.343.983.771.539,27	1.478.382.148.693,20	1.626.220.363.562,52
I	Belanja Tidak Langsung	597.940.807.797,98	657.734.888.577,78	723.508.377.435,56	795.859.215.179,11	875.445.136.697,02	962.989.650.366,73
1	Belanja pegawai	504.534.338.561,00	554.987.772.417,10	610.486.549.658,81	671.535.204.624,69	738.688.725.087,16	812.557.597.595,88
2	Bunga	5.191.298.035,98	5.710.427.839,58	6.281.470.623,54	6.909.617.685,89	7.600.579.454,48	8.360.637.399,93
3	Subsidi	0	-	-	-	-	-
4	Hibah	2.565.000.000,00	2.821.500.000,00	3.103.650.000,00	3.414.015.000,00	3.755.416.500,00	4.130.958.150,00
5	Bantuan sosial	22.444.368,00	24.688.804,80	27.157.685,28	29.873.453,81	32.860.799,19	36.146.879,11
6	Belanja bagi hasil		-	-	-	-	-
7	Bantuan Keuangan	83.627.726.833,00	91.990.499.516,30	101.189.549.467,93	111.308.504.414,72	122.439.354.856,20	134.683.290.341,82
8	Belanja tidak terduga	2.000.000.000,00	2.200.000.000,00	2.420.000.000,00	2.662.000.000,00	2.928.200.000,00	3.221.020.000,00
II	Belanja Langsung	411.814.091.931,00	452.995.501.124,10	498.295.051.236,51	548.124.556.360,16	602.937.011.996,18	663.230.713.195,80
1	Belanja pegawai	13.396.569.300,00	14.736.226.230,00	16.209.848.853,00	17.830.833.738,30	19.613.917.112,13	21.575.308.823,34
2	Belanja barang dan jasa	169.925.054.909,00	186.917.560.399,90	205.609.316.439,89	226.170.248.083,88	248.787.272.892,27	273.666.000.181,49
3	Belanja modal	228.492.467.722,00	251.341.714.494,20	276.475.885.943,62	304.123.474.537,98	334.535.821.991,78	367.989.404.190,96
	Jumlah Belanja	1.009.754.899.728,98	1.110.730.389.701,88	1.221.803.428.672,07	1.343.983.771.539,27	1.478.382.148.693,20	1.626.220.363.562,52

Sumber : DPKD Kabupaten Barru, Tahun 2015

3.3.2.3 Proyeksi Pembiayaan 2016 sampai dengan 2021

Apabila dikaitkan antara proyeksi pendapatan daerah dengan proyeksi belanja daerah Kabupaten Barru, maka jumlah pendapatan yang ada tidak mencukupi untuk mendanai seluruh belanja kegiatan yang direncanakan, atau terdapat defisit anggaran, sehingga harus ditanggulangi atau didanai dengan pembiayaan daerah yang bersumber dari SILPA.

Penerimaan pembiayaan yang diharapkan pemerintah daerah Kabupaten Barru adalah SILPA dan penerimaan piutang daerah, di bawah dapat dilihat proyeksi pembiayaan daerah untuk lima tahun ke depan baik penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan.

Untuk proyeksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barru 5 tahun ke depan dipengaruhi oleh kondisi perekonomian nasional dan regional. Berdasarkan proyeksi tersebut, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barru untuk tahun 2016-2021 diproyeksikan dengan asumsi bahwa kondisi perekonomian nasional relatif sama dengan kondisi perekonomian daerah, perekonomian global tidak mengalami perburukan dalam periode tersebut, stabilitas sektor keuangan, serta harga komoditas pangan dan energi menyesuaikan secara bertahap dan tidak mengalami gejolak.

3.3.3 Perhitungan Kerangka Pendanaan

Kebijakan anggaran merupakan acuan umum dari rencana kerja pembangunan dan merupakan bagian dari perencanaan operasional anggaran dan alokasi sumberdaya. Sementara itu kebijakan keuangan daerah diarahkan pada kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatan pada pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien.

Adapun proyeksi belanja dan pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama disajikan dalam tabel sebagai berikut ini:

Tabel 3.12

Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Kabupaten Barru Tahun 2016 – 2021

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Belanja Tidak Langsung	540.365.663.240,05	572.259.659.841,90	606.357.273.308,02	642.848.654.025,01	681.945.272.421,20	723.882.929.334,47
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	319.007.741.896,62	334.958.128.991,45	351.706.035.441,02	369.291.337.213,08	387.755.904.073,73	407.143.699.277,42
2	Tambahan Penghasilan PNS	126.179.616.474,45	132.488.597.298,17	139.113.027.163,08	146.068.678.521,24	153.372.112.447,30	161.040.718.069,66
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	1.849.680.000,00	2.219.616.000,00	2.663.539.200,00	3.196.247.040,00	3.835.496.448,00	4.602.595.737,60
4	Belanja Pemungutan Pajak Daerah	549.600.000,00	659.520.000,00	791.424.000,00	949.708.800,00	1.139.650.560,00	1.367.580.672,00
5	Belanja Bunga	5.191.298.035,98	5.191.298.035,98	5.191.298.035,98	5.191.298.035,98	5.191.298.035,98	5.191.298.035,98
6	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
7	Belanja Hibah	3.360.000.000,00	4.032.000.000,00	4.838.400.000,00	5.806.080.000,00	6.967.296.000,00	8.360.755.200,00
8	Belanja Bantuan Sosial	600.000.000,00	720.000.000,00	864.000.000,00	1.036.800.000,00	1.244.160.000,00	1.492.992.000,00
9	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	-	-	-	-	-	-
10	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	83.627.726.833,00	91.990.499.516,30	101.189.549.467,93	111.308.504.414,72	122.439.354.856,20	134.683.290.341,82
11	Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	-	-
	Belanja Langsung	58.872.367.723,20	66.092.546.855,59	75.057.632.001,02	84.482.832.199,62	96.232.755.326,46	109.817.998.747,37
1	Belanja Honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis	-	-	-	-	-	-
2	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	136.200.000,00	163.440.000,00	196.128.000,00	235.353.600,00	282.424.320,00	338.909.184,00
3	Belanja Jasa Kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dll)	6.875.451.161,70	7.562.996.277,87	9.075.595.533,44	9.983.155.086,79	11.979.786.104,15	14.375.743.324,98
4	Belanja sewa gedung kantor (yang telah ada kontrak jangka	-	-	-	-	-	-

	panjangnya)						
5	Belanja Bahan Habis Pakai	3.594.545.940,70	4.313.455.128,84	5.176.146.154,61	6.211.375.385,53	7.453.650.462,64	8.944.380.555,16
6	Belanja Bahan/Material	34.807.342.545,80	38.288.076.800,38	42.116.884.480,42	46.328.572.928,46	50.961.430.221,31	56.057.573.243,44
7	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.910.686.000,00	4.692.823.200,00	5.631.387.840,00	6.757.665.408,00	8.109.198.489,60	9.731.038.187,52
8	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.860.150.415,00	4.246.165.456,50	4.670.782.002,15	5.137.860.202,37	5.651.646.222,60	6.216.810.844,86
9	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	122.352.000,00	146.822.400,00	176.186.880,00	211.424.256,00	253.709.107,20	304.450.928,64
10	Belanja Pemeliharaan	5.002.538.460,00	6.003.046.152,00	7.203.655.382,40	8.644.386.458,88	10.373.263.750,66	12.447.916.500,79
11	Belanja Jasa Konsultasi	563.101.200,00	675.721.440,00	810.865.728,00	973.038.873,60	1.167.646.648,32	1.401.175.977,98
12	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor (yang telah afa kontrak panjangnya)	-	-	-	-	-	-
	Pembiayaan Pengeluaran	5.053.031.269,27	5.053.031.269,27	5.053.031.269,27	5.053.031.269,27	5.053.031.269,27	5.053.031.269,27
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
3	Pembayaran Pokok Utang	3.053.031.269,27	3.053.031.269,27	3.053.031.269,27	3.053.031.269,27	3.053.031.269,27	3.053.031.269,27
4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
	Total	04.291.062.232,52	643.405.237.966,76	686.467.936.578,31	32.384.517.493,91	83.231.059.016,94	38.753.959.351,11

Sumber : Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Barru, Tahun 2015

Perkiraan kapasitas kemampuan keuangan daerah dapat disajikan sea indikatif dan disesuaikan dengan kondisi dan informasi pada saat perencanaan dan penganggaran setiap tahun. Selengkapnya secara indikatif tersaji dalam tabel 3.13.

Dari hasil analisis pembiayaan riil daerah ini, dapat ditentukan persentase kerangka pendanaan berdasarkan prioritas. Adapun tabel kerangka pendanaan untuk tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 disajikan dalam tabel 3.14

Tabel 3.13

Kapabilitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021
Kabupaten Barru

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pendapatan	1.013.803.097.705,90	1.082.012.484.748,19	1.115.176.603.368,30	1.218.768.307.745,82	1.301.552.603.585,35	1.390.413.001.635,42
	Pencairan dana cadangan	0	0	0	0	0	0
	Sisa Lebih riil perhitungan anggaran	4.088.523.587,65	4.211.179.295,28	4.337.514.674,14	4.467.640.114,36	4.601.669.317,79	4.739.719.397,33
	Total Penerimaan	1.017.891.621.293,55	1.086.223.664.043,37	1.159.514.118.042,44	1.223.236.270.860,18	1.306.154.272.903,14	1.395.152.721.032,74
	Dikurangi						
	Belanja Pengeluaran Pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	604.291.062.232,52	643.405.237.966,76	686.467.936.578,31	732.384.517.493,91	783.231.059.016,94	838.753.959.351,11
	Kondisi riil kemampuan keuangan	413.600.559.061,03	442.818.426.076,71	473.046.181.464,14	490.851.753.366,28	522.923.213.886,21	556.398.761.681,63

Sumber : Olahan DPKD, Tahun 2016

Tabel 3.14

Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Tahun 2016-2021
Kabupaten Barru

No	Uraian	Tahun											
		2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
1	PRIORITAS I	237.199.920.621,50	57,53	290.311.760.135,89	65,56	290.311.760.135,89	60,70	301.284.806.216,22	61,38	325.415.116.001,39	62,23	351.755.297.135,13	63,22
2	PRIORITAS II	96.417.648.975,38	23,07	121.155.121.374,59	27,36	121.155.121.374,59	25,42	125.952.599.913,79	25,66	136.587.543.467,08	26,12	148.280.269.988,16	26,65
3	PRIORITAS III	80.982.989.464,15	19,58	31.351.544.566,23	7,08	31.351.544.566,23	13,88	63.614.387.236,27	12,96	60.920.554.417,74	11,65	56.363.194.558,35	10,13
4	BELANJA LANGSUNG	76.933.839.990,94		29.783.967.337,92		29.783.967.337,92		60.433.667.874,46		57.874.526.696,86		53.545.034.830,43	
5	BELANJA TDK LANGSUNG	4.049.149.473,21		1.567.577.228,31		3.282.940.499,36		3.180.719.361,81		3.046.027.720,89		2.818.159.727,92	
	Total	413.600.559.061,03	100,00	442.818.426.076,71		473.046.181.464,14	100,00	490.851.753.366,28	100,00	522.923.213.886,21	100,00	556.398.761.681,63	100,00

Sumber : Olahan DPKD, Tahun 2016

Prioritas I merupakan program pembangunan daerah yang terkait dengan visi dan misi atau program unggulan/*dedicated* Kepala Daerah yang harus dilaksanakan oleh daerah pada periode lima tahun mendatang. Program prioritas I berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Di samping itu, Prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Program Prioritas II merupakan program prioritas di tingkat SKPD yang merupakan penjabaran per urusan yang berhubungan dengan program/kegiatan unggulan SKPD yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu.

Prioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, dan belanja tidak terduga.